



PERAN DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENJAGA KEBUDAYAAN LOKAL KERAJINAN TANGAN PAYUNG GEULIS DI KELURAHAN PANYINGKIRAN KECAMATAN INDIHIANG KOTA TASIKMALAYA

Tiara Lestari¹⁾, Zaenal Abidin AS²⁾, Toto Kushartono³⁾

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Peran Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata dalam Menjaga Kebudayaan Lokal Kerajinan Tangan Payung Geulis di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.” Payung Geulis merupakan salah satu warisan budaya lokal yang hampir punah di tengah perkembangan zaman. Sebagai kerajinan khas yang memiliki nilai historis dan ekonomi, pelestariannya menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata dalam menjaga eksistensi Payung Geulis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran sektor publik menurut Peter Jones yang mencakup tiga dimensi, yaitu peran regulasi (regulatory role), peningkatan kemampuan (enabling role), dan peran langsung (direct role). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data diperoleh melalui triangulasi, perpanjangan pengamatan, dan peningkatan ketekunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dinas dalam menjaga Payung Geulis tergolong efektif pada aspek regulatif dan pemberdayaan, namun belum optimal pada aspek peran langsung.

Kata Kunci: Kata kunci Peran, Pemerintah, Kebudayaan Lokal

Abstract

This research is entitled "The Role of the Youth, Sports, Culture, and Tourism Office in Preserving the Local Culture of Geulis Umbrella Handicrafts in Panyingkiran Village, Indihiang District, Tasikmalaya City." Geulis Umbrella is one of the local cultural heritages that is almost extinct amidst the development of the times. As a typical craft that has historical and economic value, its preservation is a shared responsibility, especially the local government. This research aims to determine the extent of the role of the Youth, Sports, Culture, and Tourism Office in preserving the existence of Geulis

Umbrella. The theory used in this research is the theory of the role of the public sector according to Peter Jones which includes three dimensions, namely the regulatory role, the enabling role, and the direct role. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques are carried out through literature studies and field studies, such as observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques are carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Data validity tests are obtained through triangulation, extended observation, and increased persistence. The results of the study show that the role of the agency in maintaining Payung Geulis is classified as effective in the regulatory and empowerment aspects, but not yet optimal in the direct role aspect.

Keywords: Role, Government, Local Culture

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman budaya dan suku bangsa. Warisan budaya ini tidak hanya menjadi identitas bangsa, namun juga merupakan aset berharga yang memiliki nilai filosofis, historis, dan ekonomis yang tinggi. Salah satu bentuk kekayaan budaya Indonesia adalah kerajinan tangan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat lokal. Pelestarian budaya ini menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkan kebudayaan sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Provinsi Jawa Barat dikenal memiliki kekayaan budaya yang khas dan beragam. Salah satu daerah yang menonjol dalam hal kerajinan tangan adalah Kota Tasikmalaya. Kota ini dikenal sebagai sentra produksi berbagai jenis kerajinan tradisional, salah satunya adalah Payung Geulis, yaitu payung tradisional yang memiliki keindahan dan keunikan tersendiri. Payung Geulis telah menjadi simbol budaya sekaligus ikon Kota Tasikmalaya, bahkan termuat dalam logo resmi pemerintah daerah. Kerajinan ini memiliki nilai filosofis yang kuat, melambangkan perlindungan dan perhatian pemerintah terhadap masyarakat dan warisan budayanya.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup masyarakat, eksistensi Payung Geulis mulai tergerus. Puncak kejayaan Payung Geulis terjadi antara tahun 1950-an hingga 1980-an, namun sejak saat itu, produksinya mengalami penurunan signifikan.

Modernisasi dan kurangnya regenerasi serta inovasi dalam pemasaran dan desain menjadi faktor utama menurunnya minat masyarakat terhadap produk ini. Kondisi ini diperparah dengan berkurangnya jumlah perajin aktif dan kurangnya perhatian yang konsisten terhadap pelestarian kerajinan tersebut.

Tabel 1.1 Jumlah Unit Usaha di Daerah Tasikmalaya pada Tahun 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Unit Usaha
1.	2019	7 Unit Usaha Payung Geulis
2.	2020	7 Unit Usaha Payung Geulis
3.	2021	7 Unit Usaha Payung Geulis
4.	2022	9 Unit Usaha Payung Geulis
5.	2023	11 Unit Usaha Payung Geulis

Sumber: *Opendata.tasikmalaya.go.id*

Berdasarkan data di atas, sejak 2019 sampai 2021 hanya ada 7 Unit Usaha Payung Geulis di Tasikmalaya. Hal ini dikarenakan Covid-19 yang membuat usaha Payung Geulis hampir punah. Karena pasar atau konsumen utama Payung Geulis adalah acara atau *event*, yang memanfaatkan Payung Geulis sebagai dekorasi atau merchandise seperti acara pernikahan, kegiatan seremonial pemerintah dan lain sebagainya. Pada tahun 2021 hingga 2022 jenis usaha payung geulis hanya meningkat 1-2 jenis usaha payung geulis hal tidak mencapai target yang diinginkan dinas kebudayaan yaitu pada setiap tahunnya inginkan 5-7 unit usaha pertahunnya hal dikarenakan minimnya inovasi dalam pembuatan payung geulis hal ini, mengakibatkan kalah bersaing dengan payung modern.

Perlu adanya peran pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mengupayakan pelestarian kebudayaan terutama Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata sebagai perangkat daerah yang mengelola budaya lokal dan pelestarian di wilayah Kota Tasikmalaya. Sesuai

dengan peraturan Undang-undang Nomor 106 tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda, ditetapkannya Payung Geulis sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia dengan ketentuan kondisinya yang sudah terancam punah atau ditinggalkan oleh masyarakat dan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang dimana pemerintah daerah wajib melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan. Peneliti menggunakan teori peran dari Jones (dalam Mahsun, 2006), yang mencakup tiga aspek utama: regulasi, peningkatan kemampuan, dan peran langsung, untuk mengevaluasi kinerja Disporabudpar dalam pelestarian Payung Geulis. Pemilihan Kelurahan Panyingkiran sebagai lokasi penelitian didasarkan pada fakta bahwa wilayah ini memiliki jumlah pengrajin Payung Geulis terbanyak di Kota Tasikmalaya, sehingga dianggap representatif untuk mengkaji peran dinas terkait dalam promosi dan pengembangan kebudayaan lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian melalui jenis deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut (Creswell, 2016) bahwa "penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan". Pemilihan metode kualitatif ini untuk menentukan, mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan sehingga dapat memahami dan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai Peran Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Menjaga Kebudayaan Lokal Kerajinan Tangan Payung Geulis Di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah instansi pemerintah Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Maka salah satu informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Disporabudpar, Kepala Bidang Kebudayaan, Bidang Ekonomi Kreatif Payung Geulis, Pengrajin Payung Geulis, dan Masyarakat. Untuk mendapatkan data dalam penelitian kualitatif, ada berbagai teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Observasi, 2) Wawancara, dan 3) Dokumentasi. Adapula teknik analisis yang digunakan oleh peneliti, yaitu: 1) Reduksi Data, 2) Penyajian Data, dan 3) Penarikan Kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pembahasan yakni mencakup pemaparan dari hasil analisis data yang diajukan untuk memaparkan lebih jauh lagi terkait masing-masing indikator Peran dinas dalam penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teori Peran Sektor Publik menurut Jones yang menyebutkan bahwa keberhasilan sebuah Peran Sektor Publik dapat diukur oleh 3 indikator yaitu Peran Regulasi (*Regulatory Role*), Peran Peningkatan Kemampuan (*Enabling Role*) dan Peran Langsung (*Direct Role*). Berikut adalah pembahasan dari masing-masing indikator Peran Dinas dalam penelitian “Peran Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Menjaga Kebudayaan Lokal Kerajinan Tangan Payung Geulis di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

Peran Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Menjaga Kebudayaan Lokal Kerajinan Tangan Payung Geulis di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya.

Analisis data penelitian merupakan salah satu bentuk pemaparan hasil penelitian yang didapatkan melalui dengan cara wawancara dengan informan penelitian yang dianggap dapat mewakili dan memberikan data terkait “Peran

Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Menjaga Kebudayaan Lokal Kerajinan Tangan Payung Geulis di Kelurahan Panyingkiran Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya”. Analisis data hasil penelitian lapangan menggunakan teori Peran Dinas menurut Jones yang dimana terdiri dari 3 indikator untuk mengukur keberhasilan peran sektor public yaitu salah satu adalah : 1, Peran Regulasi (*Regulatory Role*). 2), Peran Peningkatan Kemampuan (*Enebling Role*). 3) Peran Langsung (*Direct Role*).

1. Peran Regulatif (Regulatory Role)

Regulatory Role merupakan salah satu indikator utama dalam menilai peran organisasi sektor publik, terutama dalam menetapkan aturan dan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Dalam konteks pelestarian budaya lokal kerajinan tangan Payung Geulis di Kota Tasikmalaya, peran regulative yaitu diwujudkan salah satunya melalui keberadaan Perda Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Cagar Budaya. Regulasi ini menjadi acuan utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar) dalam menjalankan program pelestarian ini. Hasil wawancara menunjukkan bahwa meskipun terdapat juga Peraturan Wali Kota yang bersinggungan, fokus pelaksanaan kebijakan lebih mengacu pada Perda karena dinilai lebih relevan dan mutakhir. Hal ini menegaskan bahwa Disporabudpar memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjalankan perannya, baik dari sisi perencanaan maupun implementasi kebijakan.

Dalam aspek pelaksanaan, Disporabudpar tidak hanya berhenti pada pengesahan aturan, tetapi juga aktif melakukan penegakan dan pengawasan kebijakan. Kegiatan pengawasan dilakukan secara langsung di lapangan oleh dinas terkait, terutama saat pelaksanaan kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, maupun promosi budaya. Hal ini menunjukkan adanya kontrol dan evaluasi yang berjalan simultan demi memastikan regulasi dilaksanakan secara efektif.

Selain itu, Disporabudpar turut mendorong peningkatan standar pelestarian budaya melalui program-program konkret seperti sosialisasi kepada masyarakat, bimbingan teknis (bimtek) bagi

pengrajin, pelatihan khusus, hingga penyelenggaraan bazar. Bazar tidak hanya berfungsi sebagai media promosi, tetapi juga membuka peluang usaha bagi pengrajin serta memperluas eksistensi budaya Payung Geulis ke khalayak yang lebih luas.

Berdasarkan beberapa hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa peran regulasi Disporabudpar telah berjalan dengan cukup baik. Namun, perlu diakui bahwa regulasi yang tersedia masih bersifat umum, belum secara spesifik mengatur Payung Geulis sebagai entitas budaya tersendiri. Oleh karena itu, ke depan, diperlukan penyusunan aturan yang lebih detail dan khusus agar upaya pelestarian budaya ini dapat berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan.

2. Peran Peningkatan Kemampuan (*Enabling Role*)

Enabling Role merupakan peran organisasi publik dalam memastikan keberlangsungan pelaksanaan kebijakan melalui penyediaan sarana, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam konteks pelestarian kerajinan Payung Geulis di Kota Tasikmalaya, Disporabudpar melaksanakan peran ini melalui dua pendekatan utama penyediaan fasilitas dan program pemberdayaan.

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas, Bidang Kebudayaan, dan Ekonomi Kreatif menunjukkan bahwa dinas telah menyediakan fasilitas penunjang bagi para pengrajin Payung Geulis. Namun, penyediaan ini belum merata karena keterbatasan anggaran. Hal ini dikuatkan pula oleh observasi lapangan yang menunjukkan bahwa tidak semua pengrajin mendapatkan fasilitas secara langsung, sehingga distribusi bantuan masih belum optimal. Selain penyediaan sarana, Disporabudpar aktif melaksanakan kegiatan pemberdayaan seperti sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan khusus, dan penyelenggaraan bazar budaya. Program-program ini ditujukan untuk meningkatkan keterampilan para pengrajin serta memperkenalkan Payung Geulis ke masyarakat luas. Bazar juga menjadi sarana promosi dan membuka peluang usaha yang mendukung ekonomi kreatif lokal.

Tujuan utama dari pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik pengrajin maupun masyarakat umum. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh narasumber sepakat bahwa kegiatan pemberdayaan cukup berdampak terhadap peningkatan keterampilan, partisipasi, dan kesadaran masyarakat terhadap budaya lokal. Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Disporabudpar telah menjalankan peran Enabling Role dengan cukup baik. Meskipun masih terdapat kendala dalam aspek pendanaan dan pemerataan fasilitas, berbagai kegiatan pemberdayaan telah menunjukkan hasil positif dalam mendukung pelestarian budaya Payung Geulis dan pengembangan kapasitas masyarakat.

3. Peran Langsung (*Direct Role*)

Direct Role merupakan indikator peran sektor publik dalam mengendalikan dan mengawasi secara langsung pelaksanaan kebijakan serta memastikan bahwa pelayanan publik tidak merugikan masyarakat. Dalam konteks pelestarian budaya lokal Payung Geulis, Disporabudpar Kota Tasikmalaya seharusnya memainkan peran ini melalui pengawasan kebutuhan pengrajin, efektivitas sosialisasi, serta pemahaman terhadap hambatan yang dihadapi pelaku budaya dan masyarakat.

Hasil wawancara dengan tiga pengrajin Payung Geulis menunjukkan bahwa kebutuhan para pengrajin belum sepenuhnya terpenuhi. Budi menyampaikan bahwa kegiatan seperti pameran cukup membantu, tetapi sebagian besar kebutuhan ia tanggung sendiri. Yayat dan Sandi mengungkapkan bahwa dukungan dari dinas belum konsisten, terutama dalam bentuk pelatihan atau bantuan langsung. Hal ini mengindikasikan bahwa pengawasan atas kebutuhan pengrajin belum berjalan optimal. Dalam hal sosialisasi, seluruh pengrajin menyatakan bahwa upaya Disporabudpar masih belum efektif. Sosialisasi hanya dilakukan saat ada acara tertentu atau kunjungan tamu luar, dan tidak dilaksanakan secara rutin atau sistematis. Kurangnya inisiatif dari pihak dinas membuat informasi terkait pelestarian budaya tidak

menyebarkan secara merata. Terkait faktor penghambat, sebagian besar pengrajin menilai bahwa hambatan utama terletak pada minimnya sumber daya manusia dan menurunnya minat generasi muda terhadap kerajinan Payung Geulis. Meski tidak semua pengrajin merasa terkendala secara langsung oleh peran pemerintah, tetap terlihat adanya kekosongan dalam pendampingan aktif terhadap proses regenerasi budaya. Dari sisi masyarakat, wawancara menunjukkan bahwa mereka hanya mengetahui Payung Geulis secara umum sebagai ikon Tasikmalaya, tetapi tidak memahami makna, nilai, atau sejarah di baliknya. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi kepada masyarakat luas juga belum maksimal. Suarti dan Ipin mengungkapkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya rendah, dan informasi yang tersedia belum cukup memperdalam pemahaman budaya tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa peran langsung (Direct Role) Disporabudpar dalam menjaga budaya lokal Payung Geulis belum berjalan secara efektif dan belum tepat sasaran. Kebutuhan pengrajin belum terakomodasi dengan baik, sosialisasi belum menyentuh masyarakat secara luas, dan tidak ada strategi khusus dalam menghadapi hambatan seperti menurunnya minat dan keterbatasan SDM. Oleh karena itu, perlu ada evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan peran langsung agar pelestarian budaya dapat berlangsung secara berkelanjutan dan menyentuh semua lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Peran Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Menjaga Kebudayaan Lokal Kerajinan Tangan Payung Geulis di Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kota Tasikmalaya”, dapat disimpulkan bahwa peran Disporabudpar dalam menjaga kelestarian budaya lokal, khususnya kerajinan tangan payung geulis, masih belum optimal secara keseluruhan. Hal ini dianalisis berdasarkan teori peran menurut Jones yang mencakup tiga indikator utama, yaitu Regulatory Role (peran regulatif), Enabling Role (peran peningkatan kemampuan), dan Direct Role (peran langsung).

Pertama, dari aspek *Regulatory Role*, pemerintah daerah dinilai telah berhasil menjalankan peran regulatifnya. Ini terlihat dari adanya kebijakan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2023 tentang pemajuan kebudayaan daerah dan cagar budaya yang menjadi dasar hukum dalam pelestarian budaya lokal. Selain itu, implementasi kebijakan ini dilakukan melalui pengawasan langsung di lapangan dan berbagai upaya peningkatan kualitas seperti sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan khusus, hingga kegiatan promosi budaya melalui bazar. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah cukup serius dalam mengatur dan mengawasi pelestarian budaya lokal secara formal dan legal.

Kedua, dalam *Enabling Role*, peran pemerintah dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dan pengrajin juga dinilai berhasil. Disporabudpar secara aktif memberikan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai nilai budaya dan teknik pembuatan payung geulis. Kerjasama dengan para pengrajin juga dilakukan dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, dan kolaborasi pemasaran seperti pameran dan bazar. Kegiatan ini membantu membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan kebudayaan lokal. Peran ini sangat penting karena dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat sebagai pelaku langsung budaya tradisional.

Namun, pada indikator ketiga, yaitu *Direct Role* (peran langsung), pemerintah belum sepenuhnya berhasil dan perannya belum tepat sasaran. Penelitian menunjukkan bahwa masih banyak kebutuhan pengrajin payung geulis yang belum terpenuhi, seperti akses pada bahan baku, pembiayaan, dan pelatihan lanjutan. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada para pengrajin juga belum merata dan kurang efektif, bahkan tidak semua masyarakat mengetahui atau memahami secara mendalam makna budaya dari payung geulis itu sendiri. Selain itu, minat generasi muda terhadap kerajinan ini semakin menurun, sehingga terjadi kekurangan sumber daya manusia dalam melanjutkan warisan budaya tersebut. Kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam program-program pemerintah juga menjadi tantangan tersendiri, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih intensif dan partisipatif dari pihak Disporabudpar.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Disporabudpar Kota Tasikmalaya telah menunjukkan komitmen dalam menjaga kelestarian budaya lokal payung geulis melalui regulasi dan pemberdayaan, namun belum cukup maksimal dalam pelaksanaan peran langsung kepada pengrajin dan masyarakat. Keberhasilan menjaga budaya lokal tidak hanya bergantung pada kebijakan dan pelatihan, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat serta dukungan nyata dan berkelanjutan dari pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan strategi komunikasi, kolaborasi lintas sektor, serta inovasi program yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan komunitas budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (19th ed.). Alfabeta Bandung.

Nasution, F. A. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina, Ed.; 1st ed.). Harfa Creative.Bandung

Djaenuri, A.(2015).*Konsep-konsep Dasar Pemerintahan Daerah*.Tangerang Selatan: Universitas terbuka

Apriliani, I. D., Husen, W. R., Apriani, A., & Pd, M. (2019). Analisis Motif Payung Geulis Karya Utama Di Panyingkiran Indihiang Kota Tasikmalaya . In *Jurnal Pendidikan Seni* (Vol. 2, Issue 1).

Febrianty Nitami, F., Nabila Emil, N., Megantara, T., & Rohman Ramadhan, I. (2020). Pasang Surut Industri Payung Geulis Panyingkiran Tasikmalaya Pada Kurun Waktu 1930-2007. 3(2).

Nero Sofyan, A., Sofi anto, K., Sutirman, M., Suganda Prodi Sastra Indonesia, D., Ilmu Budaya, F., & Raya Ir Soekarno km, J. (n.d.). *Kerajinan Payung Geulis sebagai Kearifan Lokal Tasikmalaya*.

Paridah Sundari, S., Heryani, A., & Tinggi Ilmu Administrasi YPPT Tasikmalaya, S. (2023). Efektivitas Program Pelestarian Payung Geulis Di Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Tasikmalaya .

Rinitami Njatrijani. (2018). 285944-kearifan-lokal-dalam-perspektif-budaya-k-67e452fc. *GEMA KEADILAN* , 5, 16–31.